

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan peradaban di seluruh belahan dunia tidak terlepas dari adanya peran globalisasi. Globalisasi adalah penggabungan kehidupan masyarakat domestik dengan masyarakat global lintas bidang dan sektor.<sup>1</sup> Globalisasi memudahkan masyarakat global untuk saling terhubung satu sama lain. Hal ini membuat seakan-akan tidak adanya batas antarbelaian dunia atau dikenal dengan *borderless world*.<sup>2</sup> Kondisi seperti ini membuat dunia internasional berkembang dengan pesat bahkan memunculkan berbagai aktor baru dalam hubungan internasional, salah satunya subnasional. Menurut Roger van der Pluijm, subnasional adalah entitas non-negara yang memiliki sifat teritorial, mirip dengan negara bagian dalam sistem federal, termasuk wilayah dan kota yang memiliki yurisdiksi dan penduduk di tingkat lokal.<sup>3</sup>

Aktor subnasional sampai hari ini telah memainkan peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara melalui hubungan dan kerja sama luar negeri. Dalam menjalankan perannya di arena internasional terdapat upaya yang dilakukan melalui bentuk diplomasi dengan subnasional sebagai aktornya yaitu paradiplomasi. Menurut Ivo Duchacek, paradiplomasi adalah bentuk dari kontak fungsional antarnegara yang dijalankan

---

<sup>1</sup> Riza Noer Arfani, "Globalisasi: Karakteristik & Implikasinya," *Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär*, Edisi 1, (2004), 1.

<sup>2</sup> Kenichi Ohmae, *The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Our Borderless World*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005), Hal.20.

<sup>3</sup> Rogier Pluijm dan Jan Mellisen, "City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics," (Clingendael: Netherland Institute of International Relations, April 2007), 9.

oleh pemerintah nonpusat dalam berbagai sektor.<sup>4</sup> Kerangka kerja sama yang kerap dilakukan oleh aktor subnasional dalam konsep paradiplomasi adalah *sister city/province*.

*Sister city/province* adalah kemitraan jangka panjang antara dua komunitas di negara yang berbeda secara resmi diakui sebagai kota, daerah atau negara bagian kembar setelah pejabat tertinggi dari kedua komunitas menandatangani perjanjian untuk menjadi kota kembar.<sup>5</sup> Selanjutnya, *sister province* dalam praktiknya sebagai alat paradiplomasi bertujuan untuk mendekatkan hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov). Seiring perkembangannya *sister province* menjadi hubungan yang saling menguntungkan antara dua provinsi yang berasal dari dua negara yang berbeda terutama provinsi yang memiliki kesamaan atau keselarasan dalam berbagai aspek.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, paradiplomasi bagi pemerintah daerah di satu sisi membawa keuntungan yang dapat diraih melalui investasi atau penanaman modal asing terutama bagi wilayah dengan keunggulan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.<sup>7</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang beberapa daerahnya menjalankan hubungan luar negeri subnasional seperti *sister city/province*. Hal ini dituangkan dalam kebijakan nasional Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merujuk kepada Pasal 363 Ayat 2, berbunyi

---

<sup>4</sup> Ivo Duchacek, *The Territorial Dimension of Politics: Within, Among and Across Nations*, (New York: Routledge, 2019), 303.

<sup>5</sup> "What is a *Sister city*?" Sister Cities International, diakses pada 7 Juni 2023, <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>.

<sup>6</sup> "Awal Mula dan Sejarah Kerja sama *Sister city*," Bagian Kerjasama Kota Bandung, diakses pada 26 April 2023, <https://kerja.sama.bandung.go.id/ksln/ksdpl>.

<sup>7</sup> Ahmad Harakan, *Paradiplomasi Investasi* (Bantul: Samudra Biru, 2020), 2-3.

kerja sama dapat dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Kemudian tata cara pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL) Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (KSDLL).<sup>9</sup>

Sampai hari ini ada beberapa daerah di Indonesia yang telah menjalin hubungan *sister province* di antaranya adalah Jawa Barat – Australia Selatan, Jawa Tengah – Queensland, Jawa Tengah – Fujian, Jawa Tengah – Chungcheongbuk-Do, Jawa Tengah – Siem Reap, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) – Gyeongsangbuk-Do, DIY – Prefektur Kyoto, Nusa Tenggara Barat – Australia Utara, Jawa Timur – Prefektur Osaka, Papua – Prefektur Yamagata, dan lain-lain. Beberapa dari kemitraan *sister province* tersebut telah mencapai tingkat *Memorandum of Understanding (MoU)* yang kemudian diterapkan dan berlangsung selama beberapa dekade.<sup>10</sup> Melihat perkembangan tersebut, mendorong daerah lain termasuk Provinsi Sumatera Barat, Indonesia untuk melakukan kerja sama serupa untuk kemajuan daerahnya.

Saat ini Provinsi Sumatera Barat, Indonesia sedang menjalin hubungan dengan Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan berupa kerja sama *sister province* dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 363, Ayat 2.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL) Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (KSDLL).

<sup>10</sup> “Bimtek Kerja Sama *Sister city/Province*,” Biro Pemerintahan Provinsi Banten, diakses pada 7 Juni 2023, <https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/post/KEMENDAGRI-TINGKATKAN-REVITALISASI-KERJA-SAMA-SISTER-CITYPROVINCE>.

ini adalah kali pertama bagi Sumatera Barat.<sup>11</sup> Dipilihnya Provinsi Jeollabuk-Do sebagai mitra kerja sama dikarenakan adanya kesamaan karakteristik dan kesesuaian dalam berbagai aspek, hubungan antara Sumatera Barat dan Jeollabuk-Do telah diinisiasi dari tahun 2017 melalui prakarsa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dan konektivitas antarpemerintah pusat keduanya yang berperan dalam upaya pembentukan hubungan dan kerja sama terutama untuk fokus sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, industri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah.<sup>12</sup>

Menurut Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, kedua provinsi ini memiliki kesamaan dalam kekayaan budaya, sejarah, dan sumber daya alam (SDA). Selain itu, mereka juga memiliki kemiripan dalam kondisi geografis dan keanekaragaman alam yang sama.<sup>13</sup> Hubungan *sister province* antara keduanya telah sampai pada tahap *Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani di Istana Basa Pagaruyung, Sumatera Barat pada 17 Februari 2023 silam.<sup>14</sup> Rangkaian tahap tersebut sesuai dengan alur yang telah ditentukan pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 9 yang membahas mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL.<sup>15</sup>

Menurut wawancara awal penulis dengan Yudi Pranata, Staf Analis Bagian Kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, yang melatarbelakangi

---

<sup>11</sup> Dedi Oscar Adams, "Cetak Sejarah, Pemprov Sumbar Jalin *Sister Province* Pertama," 16 Februari 2023, diakses pada 26 April 2023, <https://www.sumbarprov.go.id/home/news/22577-cetak-sejarah-pemprov-sumbar-jalin-sister-province-pertama>.

<sup>12</sup> Dedi Oscar Adams, "Cetak Sejarah, Pemprov Sumbar Jalin *Sister Province* Pertama".

<sup>13</sup> Dedi Oscar Adams, "Gubernur Mahyeldi Minta LOI dengan Provinsi di Korea segera Ditindaklanjuti menjadi MOU," *Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, 18 Februari 2023, diakses pada 26 April 2023. <https://sumbarprov.go.id/home/news/22580-gubernur-mahyeldi-minta-loi-dengan-provinsi-di-korea-segera-ditindaklanjuti-menjadi-mou>.

<sup>14</sup> Algamar Arif Safitra, "Pemerintah Pusat Dukung Kerja sama *Sister Province* Sumatera Barat," 19 Februari 2023, diakses pada 26 April 2023, <https://sumbarprov.go.id/home/news/22584-pemerintah-pusat-dukung-kerja-sama-sister-province-sumatera-barat>.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 9.

kerja sama *sister province* ini adalah kesamaan karakteristik daerah dan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Daripada itu, terdapat hal-hal yang menurutnya memengaruhi kelancaran kerja sama yaitu, persoalan internal birokrasi yang terjadi seperti perpindahan kepemimpinan, pandemi global, hingga kajian yang kurang lengkap dan sempat terhenti di tahun 2020 mengenai kerja sama *sister province* dengan Jeollabuk-Do. Pada tahun 2021 dimulai kembali pembuatan kajian yang baru dan lebih komprehensif untuk kemudian dilakukan pertemuan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan melalui komunikasi *virtual*.<sup>16</sup>

Dalam prosesnya, terlihat bahwa kerja sama antara kedua provinsi ini membutuhkan intensitas yang cukup tinggi dan sempat mengalami masa hiatus. Adanya keinginan kerja sama *sister province* ini agar terlaksana memperlihatkan adanya alasan dan dorongan bagi Pemprov Sumatera Barat yaitu kepentingan yang ingin dicapai. Keinginan Pemprov Sumatera Barat untuk melakukan kerja sama *sister province* ini didukung dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah ini, terlebih lingkup kerja sama yang mengutamakan sektor-sektor vital yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian tentang motif Sumatera Barat dalam proses paradiplomasi kerja sama *sister province* dengan Jeollabuk-Do dari tahun 2017-2023 sangat menarik dan relevan untuk dilakukan.

---

<sup>16</sup> Yudi Pranata Setyo, Staf Analis Bagian Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, wawancara oleh penulis, Kota Padang, 12 Juni 2023.

## 1.2 Rumusan Masalah

Peran subnasional dalam hubungan internasional terutama di era globalisasi seperti saat ini terlihat sangat signifikan dalam meningkatkan citra suatu negara secara global melalui praktik paradiplomasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Sumatera Barat, Indonesia dalam menjalin kerja sama *sister province* dengan Jeollabuk-Do, Korea Selatan. Adanya keinginan Sumatera Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah menjadikan kerja sama *sister province* sebagai salah satu opsi. Dipilihnya Jeollabuk-Do sebagai mitra didasari kesamaan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh kedua daerah. Kerja sama *sister province* ini berfokus pada sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, industri, dan peningkatan kapasitas SDM. Saat ini proses kerja sama tersebut telah melewati tahap LoI dan sesuai dengan alur yang telah ditentukan dalam kebijakan yang berlaku. Melihat adanya kepentingan yang ingin dicapai, perlu untuk diketahui motif apa yang sebenarnya melandasi kerja sama ini terutama dari perspektif Sumatera Barat sebagai aktor subnasional.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berupa, sebagai berikut: “Apa yang menjadi motif Provinsi Sumatera Barat dalam proses paradiplomasi kerja sama *sister province* dengan Provinsi Jeollabuk-Do tahun 2017-2023?”

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi motif paradiplomasi dari Sumatera Barat, Indonesia dalam menjalin kerja sama *sister province* dengan Jeollabuk-Do, Korea Selatan mulai dari pejazakan tahun 2017

sampai pada tahap *letter of intent* (LoI) tahun 2023 sekaligus menganalisis praktik paradiplomasi antara keduanya dalam skema kerja sama *sister province*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep dari paradiplomasi dalam konteks hubungan internasional sekaligus sebagai bentuk kajian paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor subnasional dan penerapan teori yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu kerja sama *sister province* sebagai bagian dari paradiplomasi.
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan serta implikasi kajian secara umum bagi para akademisi, institusi dan lembaga pemerintahan, badan atau organisasi internasional dan para pembuat kebijakan untuk mendalami, menganalisis, dan/atau sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan tentang motif dalam proses paradiplomasi kerja sama *sister province* khususnya pada proses kerja sama *sister province* antara Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dan Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan.

### 1.6 Studi Pustaka

Rujukan pertama penelitian ini adalah karya Sannya Pestari Dewi berjudul *Analisis Implementasi Kerja Sama Sister-Province Antara Provinsi Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-Do Dalam Pengembangan Desa*.<sup>17</sup> Artikel ini membahas kerja sama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-Do dalam

---

<sup>17</sup> Sannya Pestari Dewi, "Analisis Implementasi Kerja sama *Sister Province* Antara Provinsi Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do dalam Pengembangan Desa," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.2, No.1, (Maret 2020), hal. 49-53.

pengembangan wilayah pedesaan. Sannya menggunakan empat indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menganalisis kerja sama ini. Gyeongsangbuk-Do mengirim utusan pada 2001, meninjau, dan menandatangani Letter of Intent (LoI) pada 2003 serta Memorandum of Understanding (MoU) pada 2005 dengan D.I. Yogyakarta. Namun, menurut Sannya, implementasi kerja sama ini belum mencapai tujuan dan target yang sesuai dengan persepsi kedua belah pihak.

Tulisan ini merupakan referensi penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana kerja sama *sister province* menggunakan indikator kebijakan publik dalam mengukur keberhasilan pencapaian suatu kebijakan. Implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai interaksi untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian tentang kerja sama *sister province* antara Sumatera Barat, Indonesia, dan Jeollabuk-Do, Korea Selatan, pendekatan kebijakan publik menjadi relevan dan penting untuk memajukan daerah dengan otorisasi langsung dari pemerintah pusat. Referensi ini membantu penulis menyusun metode analisis yang tepat dan memahami pentingnya indikator kebijakan publik untuk mengukur kesuksesan kerja sama tersebut.

Tulisan kedua merujuk pada artikel berjudul *Implementasi Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah* oleh Masrohatun.<sup>18</sup> Artikel jurnal ini mengulas implementasi kerja sama pemerintah Jawa Tengah dengan lima pihak, yaitu Queensland (Australia), Fujian (China), Chungcheongbuk-do (Korea Selatan), dan Siem Reap (Kamboja). Tulisan ini menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kerja sama

---

<sup>18</sup> Masrohatun, "Implementasi Kebijakan Kerja sama Luar Negeri *Sister Province* di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal SAWALA*, Vol.6, No.1, (April, 2018).

yang telah disepakati sebelumnya oleh beberapa pihak. Menyoroti dinamika kerja sama yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, artikel ini memberikan pandangan mengenai upaya untuk mencapai keberhasilan dan keteraturan implementasi kebijakan kerja sama *sister province*.

Tulisan ini menjadi referensi penting bagi penulis untuk mengetahui implementasi kebijakan kerja sama pemerintah Jawa Tengah dengan negara lain. Implementasi *sister province* terbilang lemah karena kesulitan para pihak dalam menaati *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati. Faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan ini termasuk kurangnya kesadaran dalam mengimplementasikan perjanjian dengan sungguh-sungguh, kendala bahasa dalam berkomunikasi, dan kompleksnya birokrasi di dinas-dinas terkait. Referensi ini dapat membantu penulis mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kerja sama antara Sumatera Barat, Indonesia, dan Jeollabuk-Do, Korea Selatan yang saat ini telah mencapai tahap *Letter of Intent* (LoI). Penelitian ini akan didukung oleh landasan keilmuan yang lebih kuat, meningkatkan observasi dalam analisis kasus di studi kasus yang berbeda.

Tulisan ketiga merujuk pada artikel *Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City* oleh Gilang Nur Alam dan Arfin Sudirman.<sup>19</sup> Pada artikel ini membahas tentang kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dengan jalur investasi, kebudayaan, pertukaran pemuda, serta beberapa sektor potensial lainnya dalam peningkatan ekonomi dan integrasi daerah. Pada artikel ini pula menekankan beberapa hal terkait dengan praktik paradiplomasi

---

<sup>19</sup> Gilang Nur Alam dan Arfin Sudirman, “*Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City*,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (JIHI)*, Vol.16, No.1, (2020).

di antaranya, landasan konstitusi, implementasi konsep paradiplomasi, dan kesesuaian kerangka kerja sama internasional *sister city* dengan paradiplomasi.

Lebih lanjut dalam artikel ini disajikan informasi tentang keterkaitan konteks hubungan internasional, pelaksanaan diplomasi, dan bagaimana pemerintah daerah berlaku sebagai aktor internasional mewakili kepentingan negara dalam arena internasional. Terdapat tiga kepentingan yang diupayakan oleh Pemkot Bandung yaitu ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dalam melakukan praktik paradiplomasi, Kota Bandung berupaya untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai sektor yang tujuannya untuk menarik investasi asing, percepatan pembangunan kota, serta peluang dalam transaksi internasional (ekspor/impor). Maka dari itu, artikel ini dirasa dapat membantu penelitian dari segi pemetaan kebutuhan daerah dalam kerja sama *sister province*, implementasi paradiplomasi melalui *sister province*, dan membantu menganalisis upaya yang dilakukan daerah dalam membangun kerja sama *sister province*.

Artikel jurnal keempat berjudul *Potensi dan Tantangan Paradiplomasi Bandar Lampung* karya Khairunnisa Simbolon.<sup>20</sup> Artikel ini membahas potensi dan tantangan Kota Bandar Lampung dalam kerja sama internasional. Kota ini belum mencapai implementasi paradiplomasi. Artikel ini juga mengulas bagaimana daerah lain berhasil menjalin kerja sama internasional melalui aktor subnasional yang terdiri dari beberapa daerah di Indonesia dengan pihak setara di luar negeri. Dengan pendekatan kualitatif analitis, Khairunnisa menjabarkan potensi dan tantangan di bidang ekonomi, pariwisata, sumber daya alam dan manusia, lingkungan, serta pemanfaatan teknologi. Artikel ini memberikan wawasan tentang

---

<sup>20</sup> Khairunnisa Simbolon, "Potensi dan Tantangan Paradiplomasi Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (JIHI)*, Vol.4, No.1, (2022).

upaya Bandar Lampung dalam paradiplomasi dan mengidentifikasi kendala serta peluang yang dihadapinya.

Khairunnisa menunjukkan data yang tervalidasi seperti ekspor-impor dan indeks pembangunan manusia yang mendukung argumennya tentang potensi dan hambatan kerja sama paradiplomasi di Bandar Lampung. Artikel ini mencerminkan kekhawatiran bahwa kerja sama paradiplomasi seringkali hanya seremonial tanpa tindak lanjut implementasi karena kurangnya pemahaman tentang potensi dan hambatan, serta bentuk kerja sama yang tidak sesuai dengan kepentingan Bandar Lampung. Artikel ini menjadi rujukan penting untuk penelitian mengenai kerja sama *sister province* antara Sumatera Barat dan Jeollabuk-Do.

Artikel jurnal kelima yaitu *Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional* karya Takdir Ali Mukti.<sup>21</sup> Artikel ini menyajikan fenomena baru paradiplomasi dalam hubungan internasional, sebagai bagian dari interaksi lintas batas untuk mengadvokasi urusan dan kepentingan lokal di arena internasional. Paradiplomasi terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kerja sama pemerintah daerah dengan tujuan ekonomi, paradiplomasi *multipurposes* dengan kerja sama lintas sektor, dan paradiplomasi kompleks yang menyertakan identitas nasional wilayah untuk menyebarkan politik dan sosial-budaya di luar lintas sektor. Artikel ini juga mencatat pengalaman wilayah-wilayah di negara maju, seperti Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan, dalam praktik paradiplomasi.

Artikel jurnal ini merupakan referensi yang cocok bagi penulis untuk penelitian tentang pengalaman paradiplomasi subnasional di arena internasional, termasuk di Indonesia. Isinya mencakup perencanaan, dinamika, dan landasan

---

<sup>21</sup> Takdir Ali Mukti, "Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol.1, No.1, (Januari, 2015), 86.

paradiplomasi, serta contoh-contoh wilayah yang melaksanakannya. Fokus utamanya adalah pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia, termasuk regulasi, potensi nasional di tingkat daerah, dan cara mengatasi celah disintegrasi. Artikel ini akan sangat membantu penelitian tentang kerja sama *sister province* antara Sumatera Barat, Indonesia, dan Jeollabuk-Do, Korea Selatan.

### **1.7 Kerangka Konseptual**

Penerapan teori, konsep, pendekatan, dan/atau paradigma dalam menganalisis fenomena hubungan internasional sangat penting untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan dalam mengatasi persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh para aktor.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, konsep paradiplomasi akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan internasional yang berkaitan dengan paradiplomasi yang khususnya yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan melalui kerja sama *sister province*. Konsep ini akan membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam fenomena atau isu yang sedang diteliti, serta berperan penting dalam mengarahkan pertanyaan penelitian dan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data yang dikumpulkan. Selain itu, skema *sister city* atau *sister province* juga akan digunakan sebagai acuan yang relevan dalam melaksanakan penelitian ini.

#### **1.7.1 Konsep Paradiplomasi**

Konsep paradiplomasi pertama kali diperkenalkan oleh Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos sekitar tahun 1980-an dalam debat akademik bersama Presiden

---

<sup>22</sup> Muhammad Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik," *Jurnal Transnasional*, Vol.3, No.2, (Februari, 2012), 2.

Amerika Serikat, Richard Nixon dalam pembahasan mengenai model federalisme baru. Paradiplomasi berasal dari penggabungan kata ‘paralel’ dan ‘diplomasi’ yang kemudian menjadi cabang dalam konsep diplomasi yang berfokus pada interaksi lintas batas dengan subnasional sebagai aktornya.<sup>23</sup> Ivo Duchacek menyatakan bahwa, paradiplomasi merupakan bentuk kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh unit-unit negara yang tidak berbatasan satu sama lain. Dalam hal ini, paradiplomasi mengacu pada upaya pemerintah subnasional atau entitas non-pemerintah untuk menjalin hubungan internasional, bernegosiasi, atau mempromosikan kepentingan mereka di tingkat global, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan formal sebagai aktor negara dalam sistem diplomasi konvensional.<sup>24</sup> Sementara itu, Pluijm dan Mellisen menyebutkan paradiplomasi merupakan suatu arena yang cocok untuk menjelajahi titik temu antara praktik diplomasi dan perkembangan perkotaan. Aktor-aktor dalam ranah paradiplomasi menunjukkan tingkat otonomi yang penting, sumber daya yang melimpah, serta pengaruh yang semakin meningkat dalam konteks politik internasional.<sup>25</sup>

Paradiplomasi, yang juga dikenal sebagai *city diplomacy*, terkait erat dengan peran sejarah yang dimainkan oleh kota-kota sebagai kekuatan yang muncul. Ini melibatkan keterkaitan kota dengan lingkungan sekitarnya dan aktor-aktor lainnya. Kota-kota yang memiliki sejarah dalam melakukan diplomasi, termasuk komunikasi dan representasi telah ada sejak jauh sebelum era globalisasi. Bahkan di dalam sistem negara-bangsa yang berpusat pada Perjanjian Westphalia diplomasi

---

<sup>23</sup> Rodrigo Tavares, *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players* (New York: Oxford University Press, 2016), 6-8.

<sup>24</sup> Ivo Duchacek, *The International Dimension of Subnational Self Government 1<sup>st</sup> edition*, (New York: Oxford University Press, 1984), 6.

<sup>25</sup> Rogier Pluijm dan Jan Mellisen, “City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics,” (Clingendael: Netherland Institute of International Relations, April 2007), 7-9.

kota telah dilakukan.<sup>26</sup> Daripada itu, dasar hukum paradiplomasi sebelumnya telah diatur sesuai dengan konstitusi nasional suatu negara berdasarkan sistem desentralisasi sebagai dasar politik dan etika kenegaraan.

Ivo Duchacek mengemukakan bahwa paradiplomasi dapat dibagi menjadi tiga tipologi berdasarkan kondisi geopolitik yaitu, *transborder paradiplomacy*, *transregional paradiplomacy*, dan *global paradiplomacy*.<sup>27</sup> Kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah subnasional memiliki beberapa bentuk, seperti *sister city* (diplomasi dan kerja sama antarpemerintah kota), *sister province* (diplomasi dan kerja sama antarpemerintah provinsi), serta *foreign direct investment* (FDI), proyek bersama, dan bentuk lainnya.<sup>28</sup>

Kerja sama antarkota atau provinsi kembar (*sister city* atau *sister province*) sering dianggap sebagai contoh yang baik dalam mengembangkan potensi daerah tanpa terjebak dalam birokrasi yang kompleks dari pemerintah pusat. Birokrasi yang kompleks dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang bersifat efektif dan efisien, baik di tingkat daerah maupun pusat yang berkaitan dengan masalah yang timbul dan solusi penyelesaian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, birokrasi yang terkesan tidak efektif dan efisien dapat diminimalisir dengan adanya pembagian otonomi untuk mengatur penyelesaian masalah yang terjadi dari tingkat pusat ke tingkat daerah.<sup>29</sup> Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>26</sup> Christer Jönsson dan Martin Hall, *Studies in Diplomacy and International Relations: The Study of Diplomacy and International Relations* (London: Palgrave Macmillan, 2005), 126.

<sup>27</sup> Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Government in International Affairs* (New York: Routledge, 2015), 27.

<sup>28</sup> Christy Damayanti, "Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi di Indonesia Menuju Komunitas ASEAN," *Transformasi*, Vol.14, No.22 (2012), 2.

<sup>29</sup> Hendrikus Triwibawanto Gedeona, "Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan?," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No.2 (2013), 233.

kenyataan bahwa pemerintah pusat tidak selalu dapat bertindak dengan cepat dan responsif dalam menangani masalah yang terjadi di daerah.

Dengan demikian, kerja sama antarkota atau provinsi menjadi suatu alternatif yang memungkinkan daerah untuk mengatasi tantangan dan memajukan potensinya dengan lebih efektif.<sup>30</sup> Selain itu, aktor subnasional seperti pemerintah daerah tentu memiliki maksud dan tujuan dalam upaya menjalin kerja sama *sister city/province* dengan pihak lain yaitu kepentingan daerahnya. Hal tersebut juga dapat diimplikasikan sebagai motif dari aktor subnasional dalam upaya membangun kerja sama. Menurut Anthony Giddens, motif merujuk pada alasan atau dorongan individu atau kelompok dalam bertindak. Motif merupakan faktor yang memotivasi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu. Digambarkan motif sebagai dasar dari tindakan sosial, yang memengaruhi bagaimana individu atau kelompok berperilaku dan membuat keputusan.<sup>31</sup> Aktor subnasional tentunya memiliki alasan atau dorongan tersendiri (motif) untuk melakukan atau dalam upayanya membangun kerja sama dengan pihak lain.

Dalam mengungkapkan motif pemerintah subnasional dalam proses paradiplomasi hubungan dan kerja sama luar negeri, Michael Keating mengemukakan tiga set motivasi yang mendorong pemerintah subnasional untuk terlibat dalam arena internasional yaitu, sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Ekonomi: Suatu wilayah (subnasional) berusaha menarik investasi, membuka pasar, dan mengadopsi teknologi untuk modernisasi ekonomi

---

<sup>30</sup> Muhammad Yami dan Arif Darmawan, *Paradiplomacy and The Future of Cooperation Between Regions* (Amsterdam: Atlantis Press, 2014), 308.

<sup>31</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984), 3-6.

<sup>32</sup> Michael Keating, *Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strategies*, *Regional & Federal Studies* (London: Routledge, 1999), 3-6.

mereka. Dalam menghadapi mobilitas global yang meningkat, promosi pariwisata juga menjadi fokus. Investasi dalam negeri dianggap sebagai cara untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa risiko ketergantungan terhadap modal asing. Pada kebanyakan wilayah mengimbangi hal ini dengan kebijakan untuk memperkuat sektor bisnis lokal, terutama pada perusahaan kecil dan menengah. Bagi perusahaan lokal, pasar dan promosi ekspor, serta transfer teknologi, menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing. Kolaborasi antara perusahaan kecil dan menengah dari berbagai tempat diharapkan dapat menciptakan sinergi yang mendukung keberhasilan kawasan industri. Selain menarik investasi asing, beberapa wilayah juga fokus pada internasionalisasi ekonomi, pengembangan perusahaan lokal, dan ekspansi pasar melalui investasi di luar negeri.

2. Budaya: Suatu wilayah yang memiliki budaya khas sering menghadapi tantangan saat pemerintah pusatnya tidak memberikan dukungan yang memadai atau bahkan tidak memahami sepenuhnya kebutuhan untuk mempromosikan atau melestarikan budaya khas dari wilayah tersebut.

Dalam situasi seperti ini, upaya mencari dukungan dan sumber daya di tingkat internasional menjadi langkah strategis. Suatu wilayah cenderung akan mencari bantuan dari lembaga-lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, atau dukungan dari negara lain (asal dari kebudayaan tersebut) untuk mendukung langkah dalam upaya mempromosikan dan melestarikannya. Langkah ini dapat melibatkan advokasi hak-hak linguistik dan budaya, pelestarian warisan budaya, atau mendapatkan dukungan

finansial untuk proyek-proyek budaya. Terlebih lagi, situasi ini juga mungkin timbul ketika wilayah dengan bahasa atau budaya unik terletak di dalam batas administratif negara bagian yang berbeda. Dengan mencari dukungan internasional, suatu wilayah berusaha mendapatkan perhatian global terhadap situasi mereka dan memperoleh pemahaman internasional terhadap keberagaman budaya dan linguistik. Dengan demikian, mencari dukungan internasional menjadi strategi untuk melindungi dan mempromosikan keberagaman identitas budaya dan linguistik di tengah kurangnya dukungan atau pemahaman dari tingkat pemerintah nasional atau negara.

3. Politik: Suatu wilayah berupaya mencari pengakuan dan legitimasi dari komunitas internasional untuk kemudian melibatkan diri dalam agenda internasional. Selain mencakup penerimaan formal, pengakuan ini mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan dan identitas wilayah oleh komunitas global. Wilayah berupaya pembangunan hubungan diplomatik yang luas, peluang kerja sama bilateral dan multilateral, peningkatan citra dan reputasi wilayah, serta dukungan terhadap otonomi dan penyelesaian konflik. Dengan terlibat di tingkat internasional, wilayah tersebut dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya, memperkuat posisinya dalam komunitas global, dan membentuk citra yang positif di mata dunia. Hal ini memberikan platform untuk mengatasi tantangan internal dan mendapatkan dukungan untuk aspirasi wilayah tersebut.

Motif-motif ini mendorong pemerintah daerah untuk terlibat dalam paradiplomasi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi, memperkuat identitas budaya, dan mewujudkan tujuan politik. Dengan demikian, terdapat tiga alasan mengapa pemerintah daerah melakukan interaksi dalam menjalin hubungan dan kerja sama luar negeri: ekonomi, budaya, dan politik. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, pertama, pemerintah daerah memiliki beberapa tujuan sekaligus, walaupun satu alasan bisa lebih penting daripada yang lain. Kedua, alasan-alasan ini bisa bersilangan dalam berbagai cara. Ketiga, alasan-alasan ini dianggap sebagai sesuatu yang "idealistic", karena pada kenyataannya, tidak ada daerah yang memiliki alasan murni ekonomi, budaya, atau politik untuk berinteraksi dengan komunitas internasional. Keempat, kemiripan alasan yang mendorong kerjasama luar negeri oleh dasar-dasar yang telah diterapkan. Terakhir, rangkaian alasan ini memengaruhi pemilihan mitra luar negeri dan peran pemerintah daerah di dunia internasional.

### **1.8 Metodologi Penelitian**

Metodologi secara epistemologi adalah sekumpulan prosedur yang dijalankan untuk mengetahui bagaimana suatu fenomena dalam Hubungan Internasional dapat diperoleh.<sup>33</sup> Metode penelitian adalah sekumpulan cara dalam melakukan penelitian yang kemudian diaplikasikan untuk memperoleh pengetahuan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Strauss & Corbin, penelitian kualitatif pada umumnya digunakan oleh penulis untuk mengeksplorasi makna serta wawasan berdasarkan

---

<sup>33</sup> Mohtar Mas' oed, "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.*" (Jakarta: LP3ES, 1990), 3.

<sup>34</sup> Mohtar Mas' oed, "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,*" 4.

situasi yang ada dan bersifat induktif.<sup>35</sup> Lebih lanjut, penelitian kualitatif diperoleh penemuan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan dan tidak dapat ditemukan dengan cara kuantitatif. Penelitian ini dapat meneliti kehidupan seseorang, perilaku, emosi, perasaan, dan pengalaman hidup serta dapat meneliti fungsi organisasi, fenomena budaya, gerakan sosial, dan interaksi antarnegara.<sup>36</sup> Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif berupaya mendeskripsikan fenomena sosial melalui fakta-fakta yang ada di lapangan.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang cenderung mengumpulkan data lapangan di tempat yang mengalami sebuah fenomena atau permasalahan dan berupaya untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan agar dapat mudah dipahami melalui pengaplikasian konsep atau teori yang sesuai dengan fenomena yang terjadi pada permasalahan penelitian.<sup>37</sup> Penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif terkait dengan fenomena yang akan diteliti menggunakan studi kasus mengenai kebijakan publik yang diambil oleh suatu otoritas atau organisasi pemerintah.<sup>38</sup> Alasan penulis memilih jenis penelitian ini agar dapat menjelaskan apa saja motif Provinsi Sumatera Barat dalam proses paradiplomasi kerja sama dalam kerangka kerja sama provinsi kembar atau *sister province* dengan Provinsi Jeollabuk-Do.

---

<sup>35</sup> Haradhan Kumar Mohajan, "Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects," *Journal of Economic Development, Environment, and People*, Vol.7, Issue 1, (2018), 1.

<sup>36</sup> Anselm Strauss dan Julie Corbin, "*Basic of Qualitative Research*," (London: Sage Publications, 1998), 11.

<sup>37</sup> John W. Creswell, "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*," 3<sup>rd</sup> Edition, (California: Sage Publications, 2018), 175.

<sup>38</sup> John W. Creswell, "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*," 13.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan acuan bagi penulis untuk fokus dan berada pada cakupan dan periode waktu yang ditentukan. Adapun batas penelitian yang telah penulis tetapkan yaitu antara tahun 2017 hingga 2023. Rentang waktu tersebut dipilih karena pada tahun 2017, Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pengembangan hubungan dan kerja sama dengan Provinsi Jeollabuk-Do dalam kerangka kerja sama provinsi kembar atau *sister province*. Lalu pada tahun 2023, proses kerja sama *sister province* ini telah sampai pada tahap *Letter of Intent* (LoI) dan ditandatangani pada 17 Februari 2023.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah suatu unit yang perilakunya akan dianalisis, dijelaskan, dan diramalkan. Unit Analisis dapat disebut pula sebagai variabel dependen.<sup>39</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat, Indonesia sebagai aktor subnasional yang melakukan aktivitas hubungan internasional dengan Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan. Unit eksplanasi adalah suatu unit yang memengaruhi dan memberikan dampak pada unit analisis atau bisa disebut dengan variabel independen. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah paradiplomasi sebagai sistem dalam interaksi hubungan internasional.

Tingkat analisis terbagi atas tiga model yaitu reduksionis, korelasional, dan induksional.<sup>40</sup> Pada penelitian ini menggunakan model tingkat analisis induksional. Hal ini dikarenakan unit eksplanasinya berada pada tingkat sistem regional atau global yaitu paradiplomasi. Sedangkan unit analisisnya adalah Sumatera Barat,

---

<sup>39</sup> Mohtar Mas' oed, "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*," (Jakarta: LP3ES, 1990), 39.

<sup>40</sup> Mohtar Mas' oed, "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*," 44.

Indonesia yang berada pada tingkat negara-bangsa yang berarti berada satu tingkat lebih rendah daripada unit eksplanasinya.

Menurut Stephen Andriole terdapat lima tingkat analisa, yaitu individu, kelompok individu, negara-bangsa, antarnegara atau multi-negara dan sistem internasional.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, ditetapkan bahwa tingkat analisa berada pada tingkatan negara-bangsa karena yang akan diteliti adalah Sumatera Barat, Indonesia.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan penulis bersifat primer dan sekunder, serta didukung oleh triangulasi data.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara wawancara yang dilakukan oleh penulis dan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan terkait yang diserahkan berupa salinan.<sup>42</sup> Pada penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui subjek atau narasumber yang penulis wawancarai yaitu Pemerintah Daerah Sumatera Barat, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang bertugas di Bagian Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti Yudi Pranata Setyo selaku Staf Analis Bagian Kerjasama dan Zaki Fahminanda selaku Kepala Bagian Kerjasama yang terkait dalam kerja sama *sister province* antara Sumatera Barat, Indonesia dan Jeollabuk-Do, Korea Selatan. Menurut penulis, narasumber-narasumber tersebut dirasa cocok sebagai sumber informasi untuk mengetahui tentang

---

<sup>41</sup> Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi," 45.

<sup>42</sup> John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," 179-80.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis akan menggunakan tiga tahap analisis data yang ditulis oleh Matthew B. Miles dan A.M. Hubberman untuk menganalisis data. Tahapan tersebut ialah, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data dalam berbagai sumber yang dijadikan referensi. Penulis akan memadatkan data penelitian ini berdasarkan penekanan penelitian dengan menggunakan beberapa kata kunci, di antaranya; Kerja Sama, Paradiplomasi, *Sisters Province*, Sumatera Barat, dan Jeollabuk-Do. Penggunaan kata kunci dapat memudahkan bagi penulis untuk melakukan reduksi data agar dapat memperoleh data yang reliabel dan relevan dalam ranah penelitian.

- Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya dalam proses analisis. Dari data yang telah dikumpulkan dari tahap sebelumnya umumnya diatur dan dirangkum selama penyajian data, dan kesimpulan kemudian diturunkan dari ringkasan tersebut. Format data disediakan berupa deskripsi. Informasi yang terkumpul pada tahap reduksi data penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian terkait dengan kerja sama *sister province* antara Sumatera Barat dan Jeollabuk-Do.

---

<sup>44</sup> Matthew B. Miles dan A.M. Hubberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook 2<sup>nd</sup> Edition* (USA: SAGE Publications, 1994), 11.

- Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu kesimpulan, di mana penulis akan mendokumentasikan berbagai interpretasi atas data yang telah penulis kumpulkan sebelum menarik kesimpulan dari semua analisis yang diuraikan.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

### **BAB II KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERJA SAMA LUAR NEGERI MELALUI PRAKTIK PARADIPLOMASI DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai alur pemerintah daerah dalam mengambil bagian di arena internasional melalui paradiplomasi, landasan pemerintah daerah dalam kerja sama luar negeri berupa legalitas dan urgensinya, serta hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan yang mendorong terjalannya kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah.

### **BAB III PARADIPLOMASI SUMATERA BARAT DALAM MEMBENTUK KERJA SAMA LUAR NEGERI *SISTER PROVINCE* DENGAN JEOLLABUK-DO**

Dalam bab ini dijelaskan tentang bagaimana aktivitas paradiplomasi Sumatera Barat dengan Jeollabuk-Do berjalan. Pada bab ini pula dijelaskan bagaimana dinamika dan perkembangan kerja sama luar negeri *sister province* antara keduanya dan pembahasan mengenai sektor kerja sama yang akan digarap yang dilihat dari karakteristik dan potensi kedua daerah.

### **BAB IV ANALISIS MOTIF PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PROSES KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* DENGAN PROVINSI JEOLLABUK-DO TAHUN 2017-2023**

Dalam bab ini akan dijelaskan analisis dari motif Provinsi Sumatera Barat dalam proses kerja sama *sister province* dengan Provinsi Jeollabuk-Do menggunakan konsep paradiplomasi. Dalam bab ini akan ditemukan apa sebenarnya motif kerja sama ini dilakukan dan bagaimana kerja sama ini mencapai kepentingan masing-masing.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan berisi kesimpulan dan saran terkait motif dalam proses kerja sama *sister province* antara Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dan Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini dan memberikan pandangan baru terhadap fenomena hubungan internasional.